

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia pendidikan di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Pemerintah pun berupaya mengadakan program-program yang dinilai mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terutama pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Satu diantara program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengadakan Program BOS. Secara umum Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005 adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Pada tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.

Dengan adanya program BOS dari pemerintah, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Sekolah dapat mengelola dana BOS secara transparan dan professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
- c. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- d. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral didalam RKAS tersebut.
- e. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

SD Negeri 3 Sungailiat merupakan satu dari sekian banyak sekolah di Kabupaten Bangka yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pelaksanaannya, pengelola dana BOS pada SD Negeri 3 Sungailiat sering mengalami kesulitan dalam perencanaan terutama pembagian presentase pengelolaan. Standar yang dikeluarkan pemerintah belum dikuasai oleh pengelola dana BOS terutama oleh bendahara BOS yang terjun langsung mengelola dana tersebut.

Dengan uraian tersebut maka kami bermaksud untuk membuat Analisis Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Sungailiat.

1.2. Masalah

Berdasarkan informasi yang kami terima, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 3 Sungailiat adalah kesulitan dalam melakukan pengelompokkan dana BOS kedalam delapan standar pengelolaan. Hal itu menjadi kendala dalam merencanakan setiap anggaran terutama pada presentasi belanja pegawai dan presentase belanja

barang dan jasa yang sering mengalami kesimpangsiuran dalam pengelolaannya. Jadi dalam hal ini masalah kami rumuskan menjadi Bagaimana merancang Sistem Perencanaan Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri 3 Sungailiat.

1.3. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa perencanaan anggaran dana BOS, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan perencanaan dana BOS pada SD Negeri 3 Sungailiat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan KP ini terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V yaitu,

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar Belakang, Masalah, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai landasan-landasan teori yang berkaitan dengan topik, dan judul penelitian.

BAB III TINJAUAN ORGANISASI

Menjelaskan informasi singkat mengenai instansi atau organisasi tempat pelaksanaan KP.

BAB IV ANALISA SISTEM

Membahas mengenai sistem yang akan dibentuk, mulai dari menganalisa proses bisnis sampai spesifikasi basis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan yang diambil selama menganalisa sistem, dan saran penulis mengenai sistem yang akan dibangun.